

Kinerja dan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bima Tahun 2019-2023

Nurwahidah^{1*}, Siti Fatimah², Subhan Purwadinata³

^{1,2,3} Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia

Email : nurwahidah9864@gmail.com^{1*}, sitifatimah.pjk@gmail.com²,
subhan_purwadinata@staff.unram.ac.id³

Korespondensi penulis: nurwahidah9864@gmail.com

Abstract. *This study aims to evaluate the fiscal performance and capacity of the Regional Government of Bima City over the period from 2019 to 2023. To achieve this objective, a quantitative approach was employed using financial ratio analysis based on secondary data, including financial reports of the regional government and data from the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD). The analysis focuses on key indicators such as the effectiveness of locally generated revenue (PAD) management, the proportion of operational expenditures, the degree of fiscal independence, and budget realization. The findings of this research are expected to provide a comprehensive overview of the effectiveness of regional financial management and to offer strategic recommendations for enhancing sustainable fiscal performance. Furthermore, the results are anticipated to serve as a valuable reference for policymakers and researchers in advancing evidence-based and efficient practices in regional financial governance.*

Keywords: *Capabilities, Financial Ratios, Performance*

Abstrak. Studi ini bertujuan untuk menilai kinerja dan kapasitas fiskal Pemerintah Daerah Kota Bima selama rentang waktu 2019 hingga 2023. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, digunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis rasio keuangan yang bersumber dari data sekunder, termasuk laporan keuangan pemerintah daerah dan data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Analisis difokuskan pada beberapa indikator utama, yakni efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD), proporsi belanja operasional, tingkat kemandirian fiskal, serta realisasi anggaran. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas tata kelola keuangan daerah, sekaligus menawarkan rekomendasi strategis untuk mendukung peningkatan kinerja fiskal yang berkelanjutan. Di samping itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dan praktis bagi pembuat kebijakan serta kalangan peneliti dalam mengembangkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan berbasis bukti.

Kata kunci: Kemampuan, Kinerja, Rasio Keuangan

1. LATAR BELAKANG

Otonomi daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, mengajak serta peran masyarakat, pemerataan dan keadilan serta melihat potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana otonomi daerah adalah hak masyarakat daerah untuk mengatur serta mengelola daerahnya sendiri dengan mengembangkan potensi dan sumber daya daerah (Handayani et.al, 2013).

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban

daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah (Amalia & Suwarno, 2015).

Diselenggarakannya otonomi daerah untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan kreativitas melalui peningkatan peran serta masyarakat. Sementara, desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah mampu mengatur dan mengurus rumah tangga yang telah diserahkan (Firmansyah, 2022).

Menurut Handayani et al, (2013) Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan dan pengelolaan fiskal. Desentralisasi fiskal melihat seberapa besar pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan sehingga untuk menilainya dibutuhkan ukuran yang disebut sebagai kemandirian keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah.

Menurut Mataris & Digdowiseiso (2022) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dimana penetapannya harus berkesesuaian dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyusunan APBD diharapkan terjadi kesesuaian antara kebutuhan, keinginan serta bisa dirasakan semaksimal mungkin oleh masyarakat daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran dalam pemerintahan daerah menggunakan pendekatan kinerja. Pendekatan ini menggeser penekanan penganggaran yang tadinya berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada fokus kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Peraturan Pemerintah ini menentukan proses penyusunan APBD yang menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD (Manimbaga, Sondakh, and Pinatik 2021).

Menurut Abu Bakar & Sastra W.S (2021), kinerja keuangan daerah adalah sebagaimana kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan keuangan daerah yang dikatakan sebagai pendapatan asli daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya oleh pemerintah daerah. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja pemerintah daerah.

Memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan daerah, sumber penerimaan dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka

peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan cara meningkatkan pendapatan dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Kinerja keuangan daerah diukur melalui berbagai indikator, seperti rasio kemandirian keuangan, efisiensi belanja, dan efektivitas penerimaan, yang semuanya berperan penting dalam menilai kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya. Dengan menganalisis indikator-indikator tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana Kota Bima mampu mengelola keuangannya secara efektif dan efisien, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan.

Pengukuran tingkat kemampuan keuangan daerah dapat dianalisis menggunakan data keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan analisis rasio keuangan. Analisis keuangan dapat diukur dari rasio kemandirian (ekonomi fiskal), rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan perbandingan hasil capaian dari tahun anggaran dalam periode tertentu dengan tahun anggaran sebelumnya, sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi (Royda and Riana 2021).

Tabel 1. Perbandingan PAD Kota Bima dengan Dompu tahun 2021-2023

Tahun	Kota Bima	Dompu
2021	58.137.204.299	104.770.684.608
2022	68.794.231.310	78.212.171.180
2023	62.776.690.694	92.332.341.763

Data pada tabel 1 merupakan data perbandingan yang menunjukkan alokasi dana untuk Kota Bima dan Dompu dari tahun 2021 hingga 2023. Kota Bima mengalami kenaikan anggaran pada 2022, kemudian sedikit menurun di 2023. Hal ini bisa mencerminkan peningkatan kebutuhan pembangunan, diikuti efisiensi atau selesainya program tertentu. Sementara itu, Dompu menunjukkan fluktuasi tajam dengan penurunan besar pada 2022 dan peningkatan kembali di 2023, yang mungkin terkait penyesuaian kebijakan atau kapasitas fiskal. Secara umum, perubahan anggaran ini mencerminkan dinamika kinerja dan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara efektif.

2. KAJIAN TEORITIS

Keuangan Publik

Menurut Richard Musgrave dalam bukunya "The Theory of Public Finance" (1959), mengembangkan kerangka teoritis tentang peran pemerintah dalam ekonomi yang mencakup tiga fungsi utama: alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilisasi ekonomi. Teorinya menekankan pentingnya fiskal untuk menciptakan efisiensi dalam pasar dan meredakan ketidakadilan sosial melalui pajak dan pengeluaran publik (Musgrave 1959).

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah penugasan ke daerah atau sumber daya pemerintah daerah untuk membiayai fungsi-fungsi yang telah ditugaskan kepada mereka. Ini melibatkan penugasan baik sumber pendapatan asli daerah maupun transfer fiskal antar pemerintah. Sumber pendapatan asli daerah tidak hanya mencakup pajak daerah, tetapi juga pendapatan dari retribusi dan iuran, dari badan usaha milik daerah dan sumber pendapatan lain-lain. Termasuk transfer fiskal antar pemerintah bagian pendapatan dari pajak nasional yang dialihkan ke sub-nasional atau lokal pemerintah, dan hibah, baik hibah bersyarat maupun hibah umum atau hibah (Mataris & Dig, 2022). Dalam teori yang dikemukakan oleh Devas (1989), desentralisasi fiskal juga melibatkan seperangkat aturan tentang penggunaan sumber daya keuangan di tingkat sub-nasional, dan sistem untuk memantau dan menegakkan aturan tersebut.

Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Endang P. & Elien N., (2021), kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.

Menurut Endang P. & Elien N., (2021) Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya. Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan.

Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah ditunjukkan dengan kinerja keuangan dan dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan daerah dalam otonomi daerah. Menurut Royda & Riana, (2021) unsur-unsur rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk mengukur kemampuan keuangan daerah antara lain:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai semua kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan lalu lintas dan
2. Rasio Efektifitas Keuangan Daerah, menunjukkan kemampuan daerah merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.
3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, menunjukkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan yang diterima.

Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Abu Bakar & Sastra W.S, (2021) kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, ini menempatkan penekanan kuat pada penyajian data yang akurat dan metodis untuk melukiskan gambaran yang jelas. Penelitian yang menggunakan data untuk menjelaskan bagaimana memecahkan masalah saat ini dikenal sebagai penelitian deskriptif (Miftakur Rohmad dkk., 2023). Membuat deskripsi atau citra yang metodis, faktual, dan akurat tentang karakteristik, atribut, dan hubungan antara fenomena yang diteliti adalah tujuan penelitian deskriptif (Miftakur Rohmad et al. 2023). Jenis data pada penelitian ini yaitu data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah kota Tangerang khususnya Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jenis data pada penelitian ini ialah data sekunder, menggunakan data deret berkala (time series), atau runtut waktu selama lima (5) tahun yakni dari tahun 2019-2023. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bima dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang menyediakan data statistik resmi yang berkaitan dengan variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini, dan data yang didapatkan dari BPKAD dan Badan Pusat Statistik (BPS), serta Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) NTB dan Website resmi KEMENKEU Web.Djpk.Kemenkeu (<https://www.kemenkeu.go.id>).

Jenis penelitian

Metode analisis yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian (Sugiyono, 2013).

Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, ini menempatkan penekanan kuat pada penyajian data yang akurat dan metodis untuk melukiskan gambaran yang jelas. Penelitian yang menggunakan data untuk menjelaskan bagaimana memecahkan masalah saat ini dikenal sebagai penelitian deskriptif (Miftakur Rohmad, As'ad Isma, and Fauzan Ramli 2023).

Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bima dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang menyediakan data statistik resmi yang berkaitan dengan variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini, dan data yang didapatkan dari BPKAD dan Badan Pusat Statistik (BPS), serta Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) NTB dan Website resmi KEMENKEU Web.Djpk.Kemenkeu (<https://www.kemenkeu.go.id>).

Teknik Pengumpulan Data

1) Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode atau teknik pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencatat atau mempelajari dokumen-dokumen yang berisi data-data yang dipublikasikan pada instansi yang berkaitan dengan variabel penelitian.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik kuantitatif sebagai berikut:

1) Menghitung Rasio Desentralisasi (DDF) dengan menggunakan rumus :

$$DDF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kategori Kemampuan Daerah

PAD/TPB(100%)	Kemampuan Keuangan	IKR
0-10	Sangat Kurang	0-10
10-20	Kurang	10-20
20-30	Sedang	20-30
30-40	Cukup	30-40
40-50	Baik	40-50
>50	Sangat Baik	>50

- 2) Menghitung Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3. Tingkat Efektifitas PAD

E fektifitas PAD	Rasio
E fektif	>100%
Berim bang	=100%
Tidak Efektif	<100%

- 3) Menghitung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Transfer}}$$

Tabel 4. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian(100%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

- 4) Menghitung Indeks Kemampuan Rutin

$$\text{IKR} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja Rutin}} \times 100\%$$

Tabel 5. Kategori Kemampuan Daerah

PAD/TPB(100%)	Kemampuan Keuangan	IKR
0-10	Sangat Kurang	0-10
10-20	Kurang	10-20
20-30	Sedang	20-30
30-40	Cukup	30-40
40-50	Baik	40-50
>50	Sangat Baik	>50

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Kota Bima merupakan salahsatu wilayah Nusa Tenggara Barat yang berada pada bagian Timur Pulau Sumbawa dengan koordinat Lintang Selatan antara 8020' - 8030' dan antara 118041' – 118048' Bujur Timur. Luas wilayah Kota Bima adalah sebesar 222,25 km² yang terbagi dalam 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Rasanae Barat, Mpunda, Rasanae Timur, Raba, dan Asakota. Secara Geografis, Kota Bima memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : Kec. Ambalawi Kab. Bima
- Timur : Kec. Wawo Kab. Bima
- Selatan: Kec. Palibelo Kab. Bima
- Barat : Teluk Bima

Kota Bima merupakan salah satu kota yang terletak di provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Sebagai ibu kota dari Kabupaten Bima, kota ini memiliki lokasi strategis di bagian timur pulau Sumbawa dan berbatasan langsung dengan Teluk Bima di sebelah utara. Letak geografisnya yang dikelilingi oleh lautan memberi Kota Bima potensi dalam bidang perdagangan dan pelayaran. Dengan latar belakang yang kaya akan berbagai etnis, budaya suku Bima mendominasi kota ini, menjadikan tradisi dan kesenian sebagai bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Analisis Kinerja dan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bima. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh secara langsung melalui BPKAD, Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan serta Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) NTB dalam kurung waktu 2019-2023. Rasio yang digunakan oleh dalam menganalisis kinerja dan kemampua keuangan daerah Kota Bima penelitian ini adalah: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Indeks Kemampuan Keuangan Daerah. Data yang digunakan diantaranya yaitu, data APBD dan LRA Pendapatan Asli Daerah (PAD), Total Pendapatan Daerah, Total Belanja Rutin, Realisasi PAD, Anggaran PAD, serta Dana Transfer.

Tabel 6. APBD Kota Bima Tahun 2019-2021 (Ribuan Rupiah)

Laporan Realisas Anggaran (LRA) Kota Bima Tahun 2019-2021 (Ribuan Rupiah)						
No.	Keterangan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
A.	Pendapatan	774,410,991,654	715,383,787,683	729,687,511,751	805,811,256,060	773,124,623,905
1	Pendapatan Asli Daerah	50,422,855,053	47,279,817,937	46,993,516,747	49,564,399,608	51,449,182,945
2	Dana Transfer	643,423,884,046	587,547,659,216	664,762,654,304	748,451,787,052	712,153,663,997
B.	Belanja	796,259,444,362	796,653,090,964	716,700,153,287	749,196,056,305	829,916,997,925
1	Belanja Rutin	406,945,652,091	368,426,738,124	575,787,111,972	594,440,854,017	680,574,756,827
	Surplus/Defisit	-21,848,452,709	-81,269,303,281	12,987,358,464	56,615,199,755	-56,792,374,020

Sumber: BPKAD

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Pengertian lain dari APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Siregar, 2017:31). APBD ini disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.

Tabel 7. Laporan Realisas Anggaran (LRA) Kota Bima Tahun 2022-2023 (Ribuan Rupiah)

APBD Kota Bima Tahun 2019-2021 (Ribuan Rupiah)						
No.	Keterangan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
A.	Pendapatan	769,988,710,513	819,535,221,832	751,247,135,434	763,421,815,802	782,938,149,798
1	Pendapatan Asli Daerah	50,001,051,225	62,007,142,945	58,137,204,299	68,794,231,310	54,639,448,694.00
2	Dana Transfer	647,664,086,000	675,783,667,000	675,341,931,135	694,627,584,492	720,161,459,104.00
B.	Belanja	903,327,458,914	917,233,952,757	764,747,135,787	776,427,815,802	838,920,155,398
1	Belanja Rutin	443,621,682,748	515,535,147,045	597,178,338,732	618,910,955,718	687,393,545,471
	Surplus/Defisit	-133,338,748,401	-97,698,730,925	-13,500,000,353	-13,006,000,000	-55,982,005,600

Sumber: BPKAD

Sekretaris dan bidang unit pelaksanaan teknis yang mencapai kategori "Beban Sangat Optimal" menunjukkan efisiensi tinggi dalam pemanfaatan waktu dan kapasitas kerja, yang menandakan bahwa pembagian tugas untuk posisi tersebut telah disesuaikan dengan kapasitas individu, menjadikannya model bagi jabatan lainnya. Laporan realisasi anggaran ini berisikan informasi tentang realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan pada suatu entitas pelaporan. Siregar (2017:117) mengemukakan laporan realisasi anggaran adalah laporan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya kas yang dikelola oleh pemerintah dalam suatu periode.

Rasio Derajat Desentralisasi

Tabel 8. Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tahun	PAD	Total Pendapatan	Rasio (%)	Keterangan
2019	50,001,051,225	769,988,710,513	6.49	Sangat Kurang
2020	62,007,142,945	819,535,221,832	7.57	Sangat Kurang
2021	58,137,204,299	751,247,135,343	7.74	Sangat Kurang
2022	68,794,231,310	763,421,815,802	9.01	Sangat Kurang
2023	62,776,690,694	782,938,149,798	8.02	Sangat Kurang

Tingkat derajat desentralisasi fiskal Kota Bima selama 2019-2023 masih termasuk kategori sangat kurang, yang menunjukkan bahwa daerah masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Hal ini mengindikasikan bahwa otoritas fiskal dan sumber pendapatan daerah dari PAD masih terbatas, menghambat kemandirian keuangan daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara mandiri. Kondisi ini memperlihatkan perlunya upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan memperluas sumber-sumber pendapatan daerah agar tingkat desentralisasi fiskal dapat meningkat, yang pada akhirnya akan mendukung peningkatan kemandirian keuangan daerah serta otonomi yang lebih nyata.

Rasio Efektivitas PAD

Tabel 9. Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kota Bima Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio (%)	Pola Hubungan
2019	50,422,855,053	50,011,051,255	100.82	Efektif
2020	47,279,817,936	62,077,142,945	76.16	Tidak Efektif
2021	46,993,516,747	58,137,204,299	80.83	Tidak Efektif
2022	49,564,399,608	68,794,231,310	72.05	Tidak Efektif
2023	51,449,182,945	62,776,690,694	81.96	Tidak Efektif

Tingkat efektivitas PAD di Kota Bima selama periode 2019-2023 menunjukkan bahwa efektivitasnya cenderung menurun di bawah angka 100%, yang berarti realisasi PAD seringkali belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Fenomena ini mengindikasikan adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan dan pengumpulan PAD, yang berimplikasi pada terbatasnya potensi pendapatan daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri. Dampaknya, ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat tetap tinggi, dan pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan perbaikan agar efektivitas PAD meningkat, sehingga keberlanjutan fiskal dan kapasitas keuangan daerah dapat ditingkatkan.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 10. Penghitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kota Bima Tahun 2019-2023

Tahun	PAD	Dana Transfer	Rasio (%)	Pola Hubungan
2019	50,011,051,255	647,664,086,000	7.72	Instruktif
2020	62,007,142,945	675,783,667,000	9.18	Instruktif
2021	58,137,204,299	675,341,931,135	8.61	Instruktif
2022	68,794,231,310	694,627,584,492	9.90	Instruktif
2023	62,776,690,694	720,161,459,104	8.72	Instruktif

Tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bima selama 2019-2023 masih berada dalam kategori rendah, yang menandakan bahwa daerah sangat bergantung pada sumber dana dari luar, terutama dana transfer dari pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa otonomi daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan belum optimal dan masih memerlukan peningkatan kapasitas sumber pendapatan asli daerah. Implikasi utama adalah rendahnya kemampuan daerah untuk mandiri secara fiskal, yang dapat membatasi otonomi daerah dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan pengembangan sumber PAD dan optimalisasi potensi pendapatan daerah merupakan langkah penting agar tingkat kemandirian keuangan daerah dapat meningkat, mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih mandiri.

Indeks Kemampuan Rutin

Tabel 11. Penghitungan indeks Kemampuan Rutin Kota Bima tahun 2019-2023

Tahun	PAD	Belanja Rutin	Rasio (%)	Kemampuan Keuangan
2019	50,001,051,225	443,621,682,748	11.27	Kurang
2020	62,007,142,945	515,535,147,045	12.03	Kurang
2021	58,137,204,299	597,178,338,732	9.74	Sangat Kurang
2022	68,794,231,310	618,910,955,718	11.12	Kurang
2023	62,776,690,694	687,393,545,471	9.13	Sangat Kurang
Rata-rata	60,343,264,095	572,527,933,943	11	Kurang

Tingkat Indeks Kemampuan Rutin Kota Bima selama 2019-2023 menunjukkan bahwa daerah masih tergolong kurang mampu dalam membiayai belanja rutin dari PAD, dengan nilai rata-rata sekitar 11%. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan pendapatan dan belanja rutin belum optimal, sehingga daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dan sumber pendapatan eksternal lainnya. Dampaknya, kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan operasional pembangunan dan pelayanan masyarakat secara mandiri masih terbatas, yang dapat menghambat efisiensi pengelolaan keuangan dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk meningkatkan keseimbangan fiskal, perlu peningkatan pengelolaan PAD

serta efisiensi belanja rutin, sehingga indikator kemampuan rutin dapat lebih baik dan mendukung keberlanjutan keuangan daerah secara umum.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan ditulis secara singkat yaitu mampu menjawab tujuan atau permasalahan penelitian dengan menunjukkan hasil penelitian atau pengujian hipotesis penelitian, **tanpa** mengulang pembahasan. Kesimpulan ditulis secara kritis, logis, dan jujur berdasarkan fakta hasil penelitian yang ada, serta penuh kehati-hatian apabila terdapat upaya generalisasi. Bagian kesimpulan dan saran ini ditulis dalam bentuk paragraf, tidak menggunakan penomoran atau *bullet*. Pada bagian ini juga dimungkinkan apabila penulis ingin memberikan saran atau rekomendasi tindakan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Demikian pula, penulis juga sangat disarankan untuk memberikan ulasan terkait keterbatasan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian yang akan datang.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas PAD, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, dan indeks kemampuan keuangan daerah, dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan daerah Kota Bima selama kurun waktu 2019-2023 menunjukkan tantangan utama dalam efektivitas pengelolaan PAD dan tingginya tingkat ketergantungan terhadap dana pusat. Untuk meningkatkan kualitas keuangan daerah dan mendukung otonomi daerah yang semakin berkembang, diperlukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan serta pemberdayaan potensi lokal secara berkelanjutan.

Saran

Pemerintah Kota Bima disarankan untuk meningkatkan pengelolaan PAD melalui inovasi perpajakan, optimalisasi aset daerah, dan diversifikasi sumber pendapatan. Efisiensi belanja rutin, penguatan kapasitas aparatur, serta penerapan sistem keuangan yang transparan dan berbasis teknologi perlu dilakukan guna mengurangi ketergantungan pada dana pusat. Pengawasan rutin dan partisipasi masyarakat juga penting untuk memastikan anggaran tepat sasaran. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kinerja keuangan daerah meningkat dan pembangunan berjalan berkelanjutan.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja dan kemampuan keuangan daerah. Dengan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan keuangan daerah yang sebenarnya. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya untuk menambah lagi jangka waktu penelitian, tidak hanya

5 tahun saja. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lingkup wilayah penelitian, tidak hanya mengambil dari 1 Kota saja tetapi lebih luas lagi.

DAFTAR REFERENSI

- Amalia, N. C., & Suwarno, A. E. (2015). Analisis kemampuan dan kemandirian keuangan daerah dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Seminar Nasional dan Call for Papers 2021, 1–23.
- Devas, N. (1989). Fiscal decentralization in developing countries: A review of recent experience.
- Firmansyah, A. (2022). Analisis kemampuan keuangan daerah Pemerintah Semarang tahun anggaran 2019–2020. *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang (SINOV)*, 4(2), 41–49.
- Handayani, M., Sari, R. K., & Sulistyowati, A. (2013). Keuangan daerah terhadap kemiskinan. *Prosiding Seminar*, 23–30.
- Manimbaga, F., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2021). Analisis efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Bitung tahun anggaran 2014–2018. *Jurnal EMBA*, 9(2), 982–992.
- Mataris, H., & Digdowiseiso, K. (2022). Analisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Magelang tahun 2017–2019. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 7.
- Musgrave, R. (1959). *The theory of public finance*. McGraw-Hill.
- Purwanti, E., & Noviyanti, E. (2021). Analisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Salatiga tahun 2014–2018. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(2), 1–12.
- Rohmad, M., Isma, A., & Ramli, F. (2023). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tebo. *Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*, 5(1), 17–35. <https://doi.org/10.55606/ai.v5i1.285>
- Royda, & Riana, D. (2021). Analisis kemandirian dan kemampuan keuangan daerah serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 14(2), 50–64. <https://doi.org/10.30630/jam.v14i2.25>
- Volume, J. K., & Edisi Oktober. (2021). 2021 ISSN 2579-7875. *Jurnal Kritis*, 5, 1–20.